

Administrasi Pembangunan Pariwisata Super Premium Taman Nasional Komodo

Nabilla Larasati¹, Endang Indartuti², Supri Hartono³

^{1,2,3}FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: larassbella0705@gmail.com¹, endangindartuti@untag-sby.ac.id², suprihartono@untag-sby.ac.id³

Article History:

Received: 03 Januari 2022

Revised: 14 Januari 2022

Accepted: 14 Januari 2022

Kata Kunci: *Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata, Taman Nasional Komodo.*

Abstrak: *Pembangunan pariwisata merupakan salah satu rangkaian upaya pembangunan nasional berkesinambungan, yang mana dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terencana, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Pembangunan Pariwisata Super Premium di Kawasan Taman Nasional Komodo. Pembangunan Pariwisata berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan pariwisata tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, sedangkan fokus penelitian ini yaitu terkait sudut pandang Administrasi Pembangunan terhadap Pariwisata Super Premium di Taman Nasional Komodo. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pariwisata super premium Taman Nasional Komodo dapat berjalan dengan baik bila antar aktor saling bekerja sama dan menjalankan fungsinya masing-masing serta pariwisata yang baik pula juga harus ada partisipasi masyarakat lokal kawasan tersebut.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu rangkaian upaya pembangunan nasional berkesinambungan, yang mana dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terencana, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan adanya upaya tersebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BAPARKRAF) berdasrkan arahan Presiden Republik Indonesia. Kemenparekraf memiliki visi tahun 2020-2024 yaitu “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi kemenparekraf ini memiliki empat pokok utama diantaranya: (1) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang maju, (2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing, (3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan, (4) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Organisasi Internasional seperti PBB, *World Bank*, *World Tourism Organization (WTO)* menyatakan bahwa pariwisata merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan pada kegiatan yang menyangkut sosial dan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistika Nasional (BPS) kunjungan wisatawan menurut kebangsaan tercatat pada tahun 2019 sejumlah 16,11 juta, sedangkan pada

tahun 2020 tercatat hanya 4 juta wisatawan, penurunan ini terjadi karena adanya pandemi covid-19.(Badan Pusat Statistika, no date).

Terlepas dari permasalahan itu, Pemerintah membuat rencana strategis yang tertuang pada Peperes Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis, yang mana mereka menetapkan 10 daerah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satu daerah tersebut adalah Labuan Bajo (NTT) yang salah satunya di Taman Nasional Komodo.(Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2020).

Adanya kebijakan pembangunan yang berada di Taman Nasional Komodo menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, pihak-pihak tertentu menyatakan bahwa pembangunan proyek tersebut dapat membahayakan habitat komodo, habitat satwa lain, dan ekosistem flora yang ada di Taman Nasional Komodo, dengan adanya proyek wisata super premium membuat masyarakat di daerah sana terancam mata pencahariannya. Maka dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tergerak untuk menganalisis lebih dalam terkait adanya Pariwisata Super Premium di Taman Nasional Komodo yang dilihat dari sudut pandang administrasi pembangunan, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pariwisata tersebut terhadap masyarakat lokal serta menganalisis terkait kerja sama pemerintah dan pihak swasta dalam kawasan super premium Taman Nasional Komodo.

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Penulis telah menelaah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, salah satunya berdasarkan penelitian yang bertajuk “Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur” menyatakan bahwa adanya pelanggaran fundamental mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup, yang mana hal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab negara bertentangan dengan adanya proyek mega wisata ini, karena seharusnya pemerintah melestarikan dan menjaga cagar alam wisata yang seharusnya dilindungi. (Tati *et al.*, 2021).

Teori Administrasi Pembangunan

Pembangunan Nasional berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, pada hal ini memiliki tiga poin didalamnya diantaranya adalah (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Keberlanjutan Sosial, (3) Keberlanjutan Lingkungan. Ketiga poin tersebut menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, kemakmuran ekonomi, lingkungan yang sehat dan kestabilan sosial yang mandiri pada tingkat lokal provinsi maupun nasional, kualitas sumber daya alam dan lingkungan manusia yang harus dipelihara atau bila memungkinkan dikembalikan fungsinya untuk jangka panjang. (Puspaningtyas, 2019)

Pembangunan seringkali tidak mencapai sasaran dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat, oleh karena itu maka dalam administrasi pembangunan ada beberapa keharusan diantaranya:

- 1) Melibatkan rakyat
- 2) Harus menjelaskan maksud dan tujuannya kepada rakyat dan harus penjelasan tersebut dapat dipahami oleh rakyat
- 3) Dalam implementasinya dan prosesnya harus mengikutsertakan rakyat
- 4) Dilaksanakan harus sesuai dengan maksudnya, secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Puspaningtyas, 2019)

Ada beberapa ciri-ciri administrasi pembangunan yang dijabarkan pada Bedah Buku (Aulia Indriani, Etika Manda, Isma Fadillah, Siti Aisyah, 2018) menurut Irving Swerdlow dan Sault

M.Katz (1963), salah satunya yaitu:

- 1) Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administasi terhadap perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik
- 2) Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah yang kaitannya kuat dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penulis memilih tipe penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif sendiri menurut Nazir dalam Andi Prastowo (2011: 186), adalah suatu metode penelitian yang berfokus untuk meneliti suatu objek, status kelompok manusia, kondisi sosial, sistem pemikiran dan suatu peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, menurut (Nazir: 1988) studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku, literatur terkait, catatan, maupun laporan yang berkaitan dengan suatu hal yang akan diteliti. Maka dengan digunakannya metode penelitian tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana pariwisata super premium di Taman Nasional Komodo dengan sudut pandang Administrasi Pembangunan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang penulis tentukan adalah melihat sudut pandang Administrasi Pembangunan pariwisata super premium Taman Nasional Komodo.

Subjek Penelitian

Menurut KBBI, (1989: 862), Subjek penelitian merupakan sebuah pembicaraan pokok bahasan yang berupa orang, tempat maupun benda. Subjek penelitian kali ini penulis merujuk pada peranan antar aktor dalam n pariwisata super premium Taman Nasional Komodo.

Objek Penelitian

Husein Umar (2013: 18) mengungkapkan bahwa Objek Penelitian berkaitan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, ataupun segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang akan di teliti. Objek penelitian kali ini penulis merujuk pada Pariwisata Super Premium yang berada pada Taman Nasional Komodo dan kawasan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menurut Teori Administrasi Pembangunan yang dijelaskan oleh (Puspaningtyas, 2019) Pembangunan Nasional berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, pada hal ini memiliki tiga poin didalamnya diantaranya adalah (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Keberlanjutan Sosial, (3) Keberlanjutan Lingkungan. Ketiga poin tersebut menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, kemakmuran ekonomi, lingkungan yang sehat dan kestabilan sosial.

Pembangunan Keberlanjutan yang memiliki ketiga poin tersebut salah satunya adalah Taman Nasional Komodo atau biasa disingkat dengan TNK merupakan kawasan konservasi Fauna Komodo. TNK berdiri pada tanggal 6 Maret 1980 selain itu TNK ditetapkan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) sebagai warisan situs dunia

pada tanggal 19 Desember 1991. Taman Nasional Komodo memiliki luas wilayah dengan total 173.000 Ha yang terbagi antara wilayah terestrial dan perairan. Taman Nasional Komodo sendiri di bangun dengan tujuan untuk melakukan pelestarian hidup satwa komodo (*Varanus Komodoensis*) beserta lingkungan disekitarnya. (Ekosistem, no date).

Taman Nasional Komodo berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun beberapa pulau besar disana yang dijadikan destinasi wisata yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Menurut hasil Monitoring yang dilakukan oleh Balai TNK populasi komodo sedari tahun 2015-2017 mengalami fluktuatif. (Kehutanan and Ekosistem)

Adapun hasil monitoring sebagai berikut:



Gambar 1. Monitoring Populasi Komodo (Sumber: Balai TNK)

Selain pendataan tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengungkapkan pada siaran pers nya di Jakarta pada Rabu 28 Oktober 2020, bahwa terdapat 3.022 ekor komodo, yang mana jumlah tersebut bertambah 125 komodo dibandingkan pada tahun 2018. (Jauhari, 2020).

Taman Nasional Komodo didalamnya juga terdapat masyarakat asli sana, masyarakat tersebut tinggal di dalam tiga desa yaitu Desa Pasir Panjang (Kampung Rinca dan Kampung Kerora), Desa Komodo (Kampung Komodo, dan Desa Papagarang (Kampung Papagarang). Masyarakat disana juga berperan andil dalam melakukan kelestarian hidup habitat komodo dan lingkungan disekitarnya. (Ekosistem, no date).

Sejalan dengan teori administrasi pembangunan yang berkaitan dengan ciri-cirinya menurut Irving Swerdlow dan Sault M.Katz (1963) yaitu

- 1) Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administasi terhadap perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan yang berhubungan dengan Taman Nasional Komodo dimasukan sebagai bagian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Kementerian PUPR (16/10/2020). Pulau rinca menjadi sasaran pembangunan secara besar-besaran dan perubahan desain. Secara spesifik proyek penataan tersebut diberi nama '*Jurassic Park*' Taman Nasional Komodo.
- 2) Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah yang kaitannya kuat dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut data pada siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SP. 436 / HUMAS/ PP/ HMS.3//08/2018 sekitar 447,170 Ha Lahan dalam Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) akan dikuasai oleh swasta, pembagian wilayah terbagi sebagai berikut: 151,94 Ha atau 0,5 persen dari luas pulau komodo (32.169,2 Ha) dan 274.13 Ha atau 19,6 persen dari pulau padar (1.400,4 Ha) akan di kuasai oleh PT. Komodo Wildlife Ecotourism, sedangkan lahan (22,1 Ha) atau 0,1 persen dari Pulau Rinca (20,721.09 Ha) akan dikuasai oleh PT. Segara Komodo Lestari. Izin Pengusahaan Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kepada PT.KWE diberikan pada tahun 2014 dan kepada PT.SKL pada Tahun 2015. (Hariyanto, 2020) .

Berkaitan dengan teori administrasi pembangunan yang dijabarkan oleh (Puspaningtyas, 2019), bahwa dalam implementasinya dan prosesnya harus mengikutsertakan rakyat. Hal ini berkaitan dengan kutipan melalui laman berita online *merdeka.com* menurut warga kehadiran pihak swasta dalam pembangunan kawasan strategis Taman Nasional Komodo akan menambah persoalan bagi masyarakat sekitar dan juga pelaku usaha lokal, karena dengan adanya izin usaha jasa dan sarana pariwisata alam akan dipegang oleh pihak swasta, karena pihak swasta tidak hanya merealisasikan proyek seperti pengadaan resort, villa, dan hotel, tetapi akses-akses terhadap jalur wisata pun dikontrol oleh pihak swasta. Bilamana hal ini terjadi maka sangat jelas akan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal seperti *homestay*, penginapan, kapal wisata, dan *naturalis guide* akan hilang. (Moerti, 2018). Sehingga perlu adanya kerja sama yang baik antara aktor-aktor yang terlibat.

Pembahasan

Permasalahan bukan hanya ada pada konservasi komodo, namun ada hal lain yang menjadi polemic yaitu pembangunan wisata super premium di kawasan Taman Nasional Komodo yang notabene memiliki masyarakat lokal TNK akan terancam dan membahayakan penduduk asli, sebab akan terancam untuk direalokasi kawasan penduduk. selain itu akan mengganggu mata pencaharian dan mengancam perekonomian masyarakat sekitar, sebab pemerintah menggaungkan pembangunan pariwisata super premium, maka wisata yang akan dibangun adalah kawasan resort eksklusif bagi kalangan menengah atas, sedangkan hal tersebut akan berdampak pada pelaku wisata, baik masyarakat sekitar Taman Nasional Komodo dalam membuka usaha di sektor wisata maupun wisatawan kalangan menengah.

Pembangunan yang dapat terencana dengan baik seharusnya melakukan pelibatan masyarakat sesuai dengan keharusan pada teori administrasi pembangunan, seperti berikut:

- 1) Melibatkan rakyat
- 2) Harus menjelaskan maksud dan tujuannya kepada rakyat dan harus penjelasan tersebut dapat dipahami oleh rakyat. Seperti pada keterangan resmi yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, adanya pembangunan ini guna mengenalkan dan mempromosikan masyarakat lokal dan menyejahterakan ekonomi masyarakat lokal yang ada dikawasan Taman Nasional Komodo.
- 3) Dalam implementasinya dan prosesnya harus mengikutsertakan rakyat. Realita yang ditemukan saat ini dilapangan bahwa mengutip melalui laman berita online *merdeka.com* menurut warga kehadiran pihak swasta dalam pembangunan kawasan strategis Taman Nasional Komodo akan menambah persoalan bagi masyarakat sekitar dan juga pelaku usaha lokal, karena dengan adanya izin usaha jasa dan sarana pariwisata alam akan dipegang oleh pihak swasta, karena pihak swasta tidak hanya merealisasikan proyek seperti pengadaan resort, villa, dan hotel, tetapi akses-akses terhadap jalur

wisata pun dikontrol oleh pihak swasta. Bilamana hal ini terjadi maka jelas akan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal seperti *homestay*, penginapan, kapal wisata, dan *naturalis guide* akan hilang. (Moerti, 2018). Adanya investasi secara besar-besaran dapat menyebabkan privatisasi pariwisata tersebut, namun dengan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dengan pihak swasta dalam hal untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, maka hal itu akan berujung sebaliknya, kesejahteraan masyarakat sekitar akan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

- 4) Dilaksanakan harus sesuai dengan maksudnya, secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Puspaningtyas, 2019). Kelemahan pada Pemerintah sendiri pun saat ini yaitu tidak memiliki data yang lengkap terkait data masyarakat sekitar Taman Nasional Komodo Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Universitas Negeri Malang Tahun 2019, masyarakat lokal tidak turut terlibat dalam mengelola wisata di Pulau Komodo. Padahal keterlibatan masyarakat lokal di Taman Nasional Komodo dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya dapat menaikkan perekonomian bagi warga sekitar Taman Nasional Komodo dan membuat konservasi lebih efektif. Seharusnya pemerintah juga harus menekankan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Komodo, seperti guna untuk menarik wisatawan maka, desa wisata di daerah Taman Nasional Komodo juga harus dikembangkan, karena bagaimanapun budaya lokal Pulau Komodo dan Pulau Rinca harus dikenalkan pada wisatawan, sehingga bukan hanya melakukan pemasaran terkait wisata komodo, namun juga mengangkat budaya lokal pulau komodo dan pulau rinca. Untuk mempertahankan perekonomian masyarakat sekitar, seharusnya pemerintah juga memberikan lahan yang di khususkan untuk masyarakat lokal dalam membuka ragam usaha, seperti menjual souvenir khas Taman Nasional Komodo, kemudian mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam melakukan mengelola sarana prasarana wisata.

Selain itu, hal tersebut dapat terjabarkan melalui ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Irving Swerdlow dan Sault M. Kats (1963) bila disangkutpautkan dengan pariwisata Super Premium Taman Nasional Komodo yaitu meliputi:

- 1) Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administasi terhadap perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan kawasan super premium Taman Nasional Komodo ini diharapkan dapat menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk mendapatkan pengalaman pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*) yaitu pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif ataupun sebagai penggerak ekonomi nasional. Tujuan akhir dari adanya pariwisata Taman Nasional Komodo yang lebih baik ini yaitu perubahan di bidang pariwisata meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang mana pada menargetkan peningkatan wisatawan dari yang sebelumnya 2,8 juta – 4,0 juta pada tahun 2020 menjadi 16-17 juta wisatawan di Tahun 2024. Serta Kemenparekrad menargetkan pertumbuhan di bidang investasi dan akses pembiayaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan meningkat yang sebelumnya US\$ 2 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$ 3 Miliar di tahun 2024. (Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2020). Adanya investasi tersebut kemenparekraf dapat bekerja sama dengan investor untuk memberdayakan masyarakat sekitar, seperti membentuk *travel agent* maupun *guilder tour* yang mana sumber daya manusianya diambil melalui masyarakat lokal kawasan TNK, sehingga masyarakat lokal tidak begitu terancam pada aspek perekonomiannya.
-

- 2) Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah yang kaitannya kuat dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktor-aktor terkait yang berhubungan dengan pariwisata super premium ini meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, serta Pihak swasta. Aktor-aktor tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri yaitu:
- a) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Melakukan strategi pemasaran pariwisata yang berorientasi pada wisatawan mancanegara premium, yang mana wisatawan ini memiliki pengeluaran yang tinggi saat berada di kawasan wisata Taman Nasional Komodo. Pada hal ini dapat diambil contoh seperti kegiatan-kegiatan *diving, trekking, river cruising*, dan lain sebagainya. Selain itu Kemenparekraf juga harus memberikan peluang masyarakat lokal sebagai pelaku wisata disana dalam hal ini Kemenparekraf dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang berinvestasi di Kawasan Taman Nasional Komodo, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perjanjian di awal bahwa pihak swasta harus memberdayakan masyarakat lokal Taman Nasional Komodo sebagai pelaku wisata di kawasan tersebut, sehingga tidak sepenuhnya pelaku wisata dipegang oleh swasta, namun masyarakat lokal juga dapat menjadi pelaku wisata disana.
 - b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi untuk selalu menjadi konservasi Komodo yang ada di Taman Nasional Komodo, dan bukan hanya berfokus pada pariwisata dan kenyamanan wisatawan namun, KLHK juga harus memastikan bahwa Habitat Komodo disana tetap terjaga dan merasa tidak terancam dengan adanya kedatangan manusia.
 - c) Pemerintah Daerah memiliki fungsi untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat terkait pariwisata super premium Taman Nasional Komodo, sehingga masyarakat lokal di kawasan Taman Nasional Komodo ini dapat membuka peluang usaha sekaligus menjadi pelaku wisata, setidaknya kearifan lokal di kawasan Taman Nasional Komodo juga dapat ditampilkan sebagai Wisata Budaya khas TNK. Sehingga, wisatawan bukan hanya diberikan pengalaman terkait satwa maupun wisata premium di kawasan Taman Nasional Komodo, namun juga diberikan pengetahuan terkait budaya asli kawasan Taman Nasional Komodo, selain menjadi objek wisata, hal tersebut dapat dijadikan salah satu langkah pengenalan budaya khas Taman Nasional Komodo. Memberikan kawasan atau ruang sendiri untuk masyarakat lokal yang akan menjadi pelaku wisata, seperti menjadi *guide tour*, memiliki
 - d) Pihak Swasta memiliki fungsi sebagai pendorong dana dalam kawasan Pariwisata Super Premium Taman Nasional Komodo, harus melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal sebagai pengelola kawasan tersebut, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun, juga berorientasi pada aspek sosial serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata. Serta lebih menaatkan pada Visi kemenparekraf ini memiliki empat pokok utama diantaranya: (1) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang maju, (2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing, (3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan, (4) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Sejak Taman Nasional Komodo dipergunakan untuk pariwisata, masyarakat asli area tersebut yang dulunya menjadi nelayan, sudah beralih seiring berjalannya waktu yaitu menjadi

pelaku pariwisata lokal, seperti pengrajin souvenir lokal, pedagang oleh-oleh, penyewa kapal. Jika pembangunan *resort* mewah dilakukan maka akan menggeser kembali mata pencaharian masyarakat sekitar dan kembali lagi akan membahayakan konservasi terkait ekonomi berkelanjutan masyarakat di area tersebut, agar membentuk suatu ekonomi berkelanjutan peranan antar aktor harus saling berkaitan dan memegang komitmen yang kuat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan Kawasan Wisata Super Premium Taman Nasional Komodo tanpa harus mengesampingkan masyarakat lokal disana, dan masyarakat lokal harus dijadikan aktor utama dalam hal mengelola kawasan wisata tersebut.

Pembangunan akan menghasilkan tujuan yang baik bilamana adanya partisipasi masyarakat serta pemerintah yang menyerap aspirasi masyarakatnya, karena bagaimanapun yang mengerti akan kondisi sebenarnya pada daerah Taman Nasional Komodo adalah Masyarakat lokal atau masyarakat adat di daerah Taman Nasional Komodo. Terkait dengan ini pemerintah seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk membuka lahan pekerjaan terkait pariwisata disana, justru pemerintah harus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan fasilitas usaha pariwisata yang berpihak pada masyarakat lokal dan tidak membuka ruang investasi secara besar-besaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis jabarkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya kawasan wisata Super Premium Taman Nasional Komodo dapat berjalan bilamana aktor-aktor yang terlibat selalu melakukan kerja sama yang baik dalam melakukan pengelolaan kawasan wisata, selain aktor yang terlibat, masyarakat lokal pun memiliki peranan penuh dalam kawasan wisata super premium Taman Nasional Komodo sebab masyarakat lokal memiliki peranan untuk mendongkrak pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dapat berbentuk seperti memberikan fasilitas usaha pariwisata yang berpihak pada masyarakat lokal dan tidak membuka ruang investasi secara besar-besaran.

SARAN

- 1) Pemerintah harus lebih meluaskan pandangan terkait kawasan wisata super premium ini terhadap kerja sama yang dilakukan antar aktor
- 2) Pemerintah harus mempunyai program tersendiri dalam menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memberikan fasilitas untuk membuka usaha terkait pariwisata Taman Nasional Komodo maupun menjadikan masyarakat lokal sebagai pengelola utama kawasan Taman Nasional Komodo.
- 3) Pemerintah harus lebih transparan kepada publik terkait investasi yang ditanamkan di kawasan TNK, serta pemerintah harus lebih tegas terhadap pihak swasta untuk tetap menjadikan masyarakat lokal sebagai aktor utama pengelola kawasan wisata tersebut, sehingga tidak menimbulkan privatisasi pariwisata di lingkungan Taman Nasional Komodo.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia Indriani, Etika Manda, Isma Fadillah, Siti Aisyah, U. N. (2018) 'Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik', pp. 4-5. Available at: https://www.academia.edu/40781991/Administrasi_Pembangunan_Teori_dan_Praktik_BAB_I_dan_BAB_II_
- Badan Pusat Statistika (no date) *Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan)*, 2019-2020. Available at: ww.bps.go.id/indicator/16/1470/2.
-

- Ekosistem, D. J. K. S. D. A. dan (no date) *Taman Nasional Komodo*. Available at: <http://ksdae.menlhk.go.id/tn/field/komodo/>.
- Hariyanto, V. (2020) *Menyoal Kebijakan Kontroversi di Taman Nasional Komodo, Mongbay Situs Berita Lingkungab*. Available at: <https://www.mongabay.co.id/>.
- Jauhari, A. (2020) *KLHK Ungkap Populasi Komodo Alami Peningkatan, Begini Penjelarasannya, 29 Oktober*. Available at: indramayu.pikiran-rakyat.com.
- Kehutanan, K. L. H. dan and Ekosistem, D. J. K. S. D. A. dan (no date) *Hasil Monitoring Komodo di Taman Nasional Komodo Tahun 2017*. Available at: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/2775/hasil-monitoring-komodo-di-taman-nasional-komodo-tahun-2017.html> (Accessed: 4 November 2021).
- Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia (2020) 'Rencana Strategis KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF 2020-2024', *Kememparekraf*, pp. 1–136.
- Moerti, W. (2018) *Warga tolak komersialisasi pengembangan wisata Taman Nasional Komodo, Merdeka.com*. Available at: <https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-tolak-komersialisasi-berkedok-pengembangan-wisata-pulau-komodo.html>.
- Tati *et al.* (2021) 'Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Identitas*, 1, pp. 42–52.
-